

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan pemikiran dan gagasan, disertai data dan fakta yang mendorong dilakukannya penelitian tentang kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan. Berikut akan dipaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian (tujuan umum dan khusus) dan manfaat penelitian

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penelitian mengenai kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan warga dipandang perlu setidaknya karena beberapa hal. Pertama, berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28, setiap warga negara memiliki hak untuk kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kedua, sebagai negara demokrasi, kedudukan warga negara pada hakikatnya merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Teori kedaulatan rakyat ini sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi (JJ Rousseau: 1712-1778) dalam karyanya *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique* (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik)

Ketiga, agregasi kepentingan merupakan penggabungan berbagai kepentingan yang sama untuk dituangkan dalam rumusan kebijaksanaan dimana dalam proses tersebut diperlukannya upaya untuk menyalurkannya, hal tersebut dapat dilakukan dengan komunikasi politik yang merupakan bagian penting dalam menjalankan sistem politik. Karena, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dimana informasi politik di sampaikan kepada bagian yang satu ke bagian yang lain dalam satu kesatuan sistem politik, sehingga terjadi respon dari pesan tersebut dan terjadinya pertukaran informasi politik satu sama lainnya. Komunikasi politik memiliki peranan dalam proses kehidupan sistem politik dan komunikasi politik merupakan bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik (**Gabriel A. Almond** yang amat berpengaruh di dalam buku *The Politics of The Developing Areas* pada

tahun 1960). Maka, komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian aspirasi atau pesan dari masyarakat kepada pemimpin yang memiliki kewajiban bersama untuk bekerja dan berbuat untuk kemaslahatan dan kepentingan bangsa dan negara (Dan Nimmo, 1989: hlm 62.).

Keempat, pentingnya keterampilan partisipasi dalam negara demokrasi bertujuan untuk mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengembangkan tiga fungsi pokok, salah satunya adalah mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Seperti yang telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (dalam Branson, dkk., 1999, hlm. 4). Aristoteles menyatakan, “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan”. Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Sedangkan keterampilan partisipasi meliputi: berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.

Secara konseptual, kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan warga dapat dimaknai sebagai suatu kerangka partisipasi politik warga negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengubah pandangan mengenai budaya politik yang awalnya adalah budaya politik parokial yang tingkat kepeduliannya rendah terhadap pemerintah menjadi teori budaya politik partisipan, yang ditandai dengan kesadaran politik tinggi. Di mana masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan serta tuntutan. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan warga negara. Namun pada kenyataannya harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini terdapat indikasi yang menunjukkan rendah partisipasi masyarakat.

Pertama, citra pemerintah yang sangat kental dengan unsur negatif di masyarakat dan terkesan tidak peduli dengan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi (Sukatendel, dalam Soemirat dan Ardianto. 2002, hlm. 111-112). Jadi dapat dikatakan bahwa kesan atau anggapan dari masyarakat terhadap pemerintah dalam memerintah hanya diliputi dengan unsur negatif yang terkesan

tidak peduli dan hanya memperkaya diri sendiri. Image yang berkembang dalam masyarakat memandang pemerintah hanya sibuk dengan urusan politik yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa memikirkan nasib rakyat. Hal ini lah yang membuat citra buruk pemerintah di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa simpati terhadap pemerintah.

Kedua, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sebelumnya. Kekecewaan merupakan suatu bentuk ungkapan perasaan kecewa yang disebabkan oleh ketidakpuasan karena tidak terkabulnya suatu keinginan atau harapan. Dalam hal ini kekecewaan yang timbul dalam masyarakat di sebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sudah-sudah. Kinerja pemerintah yang sebelumnya dinilai tidak memperlihatkan kemajuan atau progres yang baik seperti janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye. Hal ini lah yang menimbulkan rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan rendahnya penyaluran aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga.

Ketiga, pemerintahan dilaksanakan bukan oleh orang yang diharapkan masyarakat. Pada kalimat ini lebih menekankan kepada “bukan oleh orang yang diharapkan”. Artinya, pemerintahan yang sedang berjalan saat ini bukan dijalankan oleh orang yang diinginkan oleh masyarakat. Ada beberapa kriteria yang diharapkan masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Misalkan kriteria tersebut diantaranya: jujur, amanah, cerdas, bertanggung jawab, memiliki inisiatif, rela berkorban, dan dapat mencintai dan dicintai oleh rakyatnya.

Keempat, masyarakat meragukan relevansi antara janji pemerintah dan realita yang terjadi. Artinya, walaupun pemilihan umum berhasil mendudukan pemimpin baru, namun kebijakan tidak berubah dan perbaikan janji tak kunjung terwujud. Dampaknya adalah masyarakat merasa enggan untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi. Yang pada akhirnya semakin lama masyarakat semakin apatis untuk menyumbangkan aspirasinya bagi negara.

Kelima, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat partisipasi

masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam keberhasilan menjalankan roda pemerintahan. Secara sadar atau tidak pemerintah memiliki suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja dari pemerintah sebelumnya maka, masyarakat enggan untuk ikut terlibat lagi dalam proses-proses selanjutnya. Karena menurut mereka hasil kinerja sebelumnya pun tidak cukup baik hasilnya.

Realita yang terjadi saat ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi sebagai bentuk haknya sebagai warga negara. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan masalah baru, yaitu kurangnya kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan warga. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya kepada Kepala Bidang Layanan LAPOR bahwa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan pengaduan pada *website* www.palembang.go.id. Per harinya hanya sekitar 4 sampai 5 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan *website* E- Lapor, penggunaannya bisa sampai 10 sampai 15 orang per harinya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akar timbulnya ke lima indikasi tersebut karena, kurangnya komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan juga sebaliknya. Saat ini kecenderungan yang terjadi adalah ketika komunikasi hanya berjalan satu arah yakni dari pemerintah kepada masyarakat dan tidak sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya *website- website* pemerintah yang menyajikan program- program pemerintah serta kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti *website* www.palembang.go.id yang menyajikan tentang program pemerintah dan *website* Bakohumas yang berisikan kegiatan-kegiatan keseharian dari pemerintah Kota Palembang. Dan pada akhirnya masyarakat tidak memiliki ruang atau wadah untuk menuangkan aspirasinya. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat memilih untuk bersifat pasif dalam kegiatan partisipasi politik. Dalam realitanya keadaan seperti inilah yang menjadikan masyarakat bersifat parokial atau dengan kata lain masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian rendah terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Palembang

meluncurkan fasilitas untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah yaitu melalui penyediaan *website* LAPOR. Mengapa pemerintah memilih *website* sebagai media komunikasi dan penyaluran aspirasi bagi masyarakat? Karena pemerintah Kota Palembang menilai media online termasuk salah satunya adalah *website*, merupakan media yang mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa dari Populasi penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 262 juta orang, lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung dengan jaringan internet sepanjang tahun 2017. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Sumatera menjadi masyarakat tertinggi kedua yang paling banyak menggunakan internet setelah pulau Jawa yakni sekitar 57,70%. Selanjutnya pulau Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63%, dan Maluku-Papua 2,49 %.

Keterampilan masyarakat Kota Palembang dalam menggunakan fasilitas internet dan teknologi informasi sudah sedemikian melekat dengan keseharian masyarakat kota Palembang. Fenomena ini merupakan salah satu modal utama penciptaan kota cerdas atau “smart city” di kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu bagian dari kota yang memiliki tingkat ketertarikan terhadap internet tertinggi kedua se-Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang resmi meluncurkan layanan Smart Aspiration to Urban City (Smartuc) Palembang. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi seluler untuk menjangkau seluruh masyarakat dalam rangka menuju Palembang Smart City (www.palembang.go.id). Konsep ini merupakan impian bagi seluruh kota-kota di Indonesia karena diyakini bisa menyelesaikan berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan keamanan warga kota. Konsep kota cerdas ini menonjolkan sebuah tatanan kota yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Beberapa kota besar di Indonesia yang sudah menerapkan konsep “smart city” ini antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Palembang (www.tribunnews.com). Pemerintah Kota Palembang saat ini telah menyediakan layanan pengaduan berupa *website* LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) *website* tersebut telah dibuat sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memfasilitasi

pengaduan dari warga kota Palembang secara langsung agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. *Website E – lapor* terkoneksi dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Palembang diantaranya, Dinas Pemadam Kebakaran, Tirtamusi dan Dinas Perhubungan. Pembangunan kota cerdas tidak terlepas dari “smart society” atau masyarakat yang cerdas melainkan masyarakat harus memahami betul apa peran teknologi dalam membangun sebuah masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah kesadaran bahwa kita hidup dalam sebuah jaringan yang merupakan esensi dari sebuah masyarakat yang cerdas.

Hal ini sejalan dengan visi misi dari kota Palembang yakni untuk mensejahterakan masyarakat dan mensukseskan kota Palembang. Adapun point pertama yang dapat digaris bawahi terkait dengan “Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat” yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- Meningkatkan Sistem pelayanan prima bagi masyarakat.
- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik/ Good Governance.
- Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti **Bagaimana kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan dalam pemanfaatan *website* pemerintah Kota Palembang?**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kebijakan pemerintah idealnya didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga tidak dipertanyakan urgensinya ketika kebijakan sudah dikeluarkan. Sayangnya beberapa ungkapan kekecewaan masih sering menyertai implementasi kebijakan di beberapa daerah. Selain karena, implementasinya yang menyimpang dari kebijakan, masyarakat merasa kepentingannya tidak terwadahi. Demi ketajaman analisis permasalahan tadi, diidentifikasi dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana makna *website* Kota Palembang sebagai media penyampai aspirasi dan pengaduan online rakyat?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Palembang dalam merespon aspirasi masyarakat Kota Palembang melalui pemanfaatan *website* pemerintah Kota Palembang?
3. Bagaimana realitas sosial masyarakat Palembang yang terbentuk melalui pemanfaatan *website* Pemerintah Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan baik yang sifatnya umum dan khusus. Berikut merupakan tujuan penelitian sebagaimana tercermin dari perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesadaran kewargaan dalam agregasi kepentingan dalam pemanfaatan *website* pemerintah Kota Palembang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *website* Kota Palembang sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Palembang dalam membentuk aspirasi masyarakat Kota Palembang melalui pemanfaatan *website* pemerintah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui realitas sosial di masyarakat tentang pemanfaatan *website* Pemerintah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membangun Kesadaran Kewarganegaraan Dalam Agregasi Kepentingan Warga di Kota Palembang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan demokratis. Oleh karena itu, secara teoritis penelitian dapat memperkaya wawasan dan keilmuan

pendidikan kewarganegaraan terutama dalam dimensi sosial, politik dan kemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan aspirasi dan pembentukan kesadaran kewarganegaraan dalam agregasi kepentingan warga di kota Palembang.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat yang partisipatif dan demokratis dalam menyampaikan aspirasi melalui *website* yang disediakan oleh pemerintah Kota Palembang.

1.4.2.3 Bagi Penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan Dalam Pemanfaatan *Website* Pemerintah Kota Palembang.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni: bab pertama membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis. Bab kedua membahas kajian pustaka yang meliputi; kajian kegiatan partisipasi politik melalui *community civic*, partisipasi politik, komunikasi politik, *website* sebagai sarana partisipasi masyarakat ; Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, partisipan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas data, dan kerangka berpikir. Bab keempat membahas tentang temuan dan pembahasan, yang dibahas yaitu deskripsi lokasi penelitian, identifikasi subjek penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Bab kelima membahas tentang Simpulan, implikasi dan rekomendasi.